



Danais Sasar Problem Kemiskinan

JOGJA—Dana Keistimewaan tahun anggaran 2020 akan lebih banyak diarahkan ke desa untuk peningkatan program terutama yang mengarah ke pengentasan kemiskinan.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Hal itu disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan pada 2020. Paniradyapati DIY Beny Suharsono menjelaskan pada 2020 mendatang DIY akan mendapatkan danais sebesar Rp1,32 triliun. Dengan adanya perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan ke depan diharapkan penggunaan danais bisa lebih banyak sampai ke desa.

Namun, kata Beny, hakikatnya

bukan hanya danais tetapi manfaat dari perubahan itu sebagai bentuk penyaluran program kegiatan dari kebijakan Pemda DIY sampai desa. Salah satunya program pengentasan kemiskinan yang akan banyak melibatkan desa di dalamnya dengan penyaluran setiap program termasuk menggunakan danais. Desa akan mendapatkan banyak dana termasuk danais untuk berbagai program kegiatan.

"Saya lebih sepakat bahasanya bukan ke anggaran, tetapi desa akan ditambahi program kegiatan yang nanti berdampak pada [penggunaan] anggaran," katanya dalam acara *Raker Anggota DPD RI dengan Pemda DIY terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan UU Keistimewaan DIY*, di Gedung Pracimasono, Kepatihan, Jogja, Selasa (17/12).

► Halaman 6

Danais Sasar...

Jika pada 2019 baru dua kabupaten – dengan skema bantuan keuangan khusus (BKK), lanjutnya, pada 2020 akan diberikan pada semua kabupaten dan kota di DIY. Harapannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apabila BKK diperkuat di seluruh kabupaten dan kota maka ke depan BKK juga akan diberikan kepada kabupaten melalui kabupaten, tetapi realisasinya akan menunggu hasil evaluasi. Karena rentang kendali pertanggungjawabannya sangat ketat, jika satu urusan tidak mampu menyelesaikan realisasinya pada termin berikutnya tidak bisa diajukan kembali,” ujarnya.

“Kami pantau yang sekiranya bermasalah, misalnya kontrak yang seharusnya selesai di pertengahan Desember tetapi muncul gejala belum selesai, ini akan kami kawal,” ujarnya.

Adapun capaian makro dampak dari danais antara lain, kata Beny, mampu menutup kesenjangan meski berjalan pelan, sehingga pada 2020 akan lebih banyak untuk memperkecil kesenjangan dan mengurangi kemiskinan.

Serapan Anggaran

Adapun, serapan penggunaan dana keistimewaan (danais) per 11 Desember 2019 mencapai 94,68% atau sekitar Rp1,093 triliun realisasi anggaran.

Berdasarkan data Paniradya Kaistimewaan DIY, total serapan danais per 11 Desember 2019 total sudah mencapai 94,68% untuk fisik dan 91,11% untuk keuangan, dengan total Rp1,093 triliun realisasi anggaran dari

Rp1,2 triliun pagu danais di 2019. Serapan itu terdiri atas kebudayaan telah menggunakan sebesar Rp474,69 miliar atau sekitar 93,54% dari pagu sebesar Rp554,10 miliar, kemudian tata ruang serapan sebesar Rp579,22 miliar atau sekitar 97,55% dari total jatah sebesar Rp606,31 miliar. Sedangkan penggunaan untuk pertanahan terserap Rp23,11 miliar dari total pagu Rp22,23 miliar dan kelembagaan terserap Rp14,24 miliar dari pagu anggaran Rp15,34 miliar.

Beny mengatakan sejumlah pekerjaan yang belum selesai seperti pembangunan Taman Budaya Gunungkidul serta jalur pedestrian di Jalan Sudirman, Kota Jogja. Namun ia optimistis akhir tahun ini akan terselesaikan.

Adapun untuk tata ruang sebagian besar digunakan untuk penyelesaian pembebasan lahan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JLS) dari ujung Kulonprogo sampai Gunungkidul sepanjang 116 kilometer. “Pembangunan Taman budaya Gunungkidul masih proses dan pencairan sesuai termin, tergantung kontraknya ada batas waktunya, begitu batas waktu kontrak selesai harus dibayar sesuai terminnya. Kemudian pembangunan jalur pedestrian di Jalan Sudirman [Jogja] itu juga masih proses. Kaitan dengan kontrak, rekanan,” ungkapnya.

Anggota DPD RI GKR Hemas berharap masyarakat akan lebih dekat mengambil danais. Namun Hemas menyatakan untuk mendapatkan danais dari Pemerintah Pusat memang tidak mudah harus melalui beberapa proses, selain itu desa harus

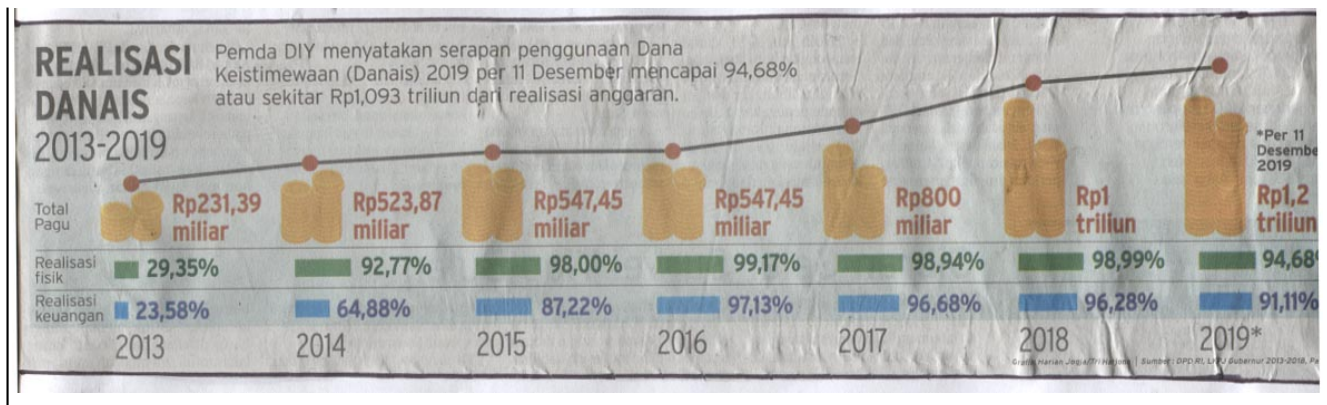
diberikan pemahaman terkait dengan pelaporan keuangan.

“Aturan danais itu juga tidak mudah, tetap menjadi tanggung jawab [penggunanya]. Sekarang kami lihat saja dana desa, belum semua aparat desa paham, makanya Kulonprogo kemarin ada yang tertangkap. Sebenarnya bukan persoalan yang signifikan karena belum paham penggunaannya, harus disalurkan ke mana, sama sebetulnya [dengan danais]. Jadi jangan dilihat danais itu juga sangat mudah diakses oleh Kraton, ini juga tidak, seperti yang tadi disampaikan Masjid Patok Ngoro pun anggaran danais tidak mencukupi pembangunan secara keseluruhan,” katanya.

Anggota DPD RI lainnya Cholid Mahmud mengatakan pengelolaan danais DIY saat ini menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Selama ini, dana otsus hanya digelontorkan begitu saja tanpa melalui program yang jelas karena tanpa melalui proposal.

Bahkan dana otsus setelah dievaluasi sekian lama penggunaannya tidak bisa menghasilkan seperti mengejar ketertinggalan bidang pendidikan dan lainnya. Berbeda dengan danais yang diperoleh harus melalui perencanaan. Hanya saja ia mengakui dari sisi pemanfaatan danais masih perlu ditingkatkan.

“Secara administrasi keuangan negara, danais DIY ini jauh lebih bagus daripada model pengelolaan dana otsus. Model DIY ini saat ini jadi rujukan sehingga dana negara ini tidak diberikan secara gelondongan, yang sulit dievaluasi,” katanya.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005